

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik memiliki peranan penting dalam menentukan arah pembangunan ataupun dalam rangka menyelesaikan suatu persoalan secara empiris dan sistematis. Kebijakan publik merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang merujuk pada bagian dari kebijakan secara umum. Azas demokrasi kebijakan publik bukan semata-mata berkaitan dengan mekanisme administrasi negara, namun juga berhubungan dengan dinamika politik karena kebijakan publik tersebut memerlukan aspek transparansi, akuntabilitas, serta apresiasi dan penilaian dari masyarakat. (Cavatoro and Spina,2020:45-46)

Kebijakan publik memiliki makna penting untuk mengatur kehidupan masyarakat pada suatu negara melalui tatanan dan regulasi yang jelas. Penerapan kebijakan publik pada negara demokrasi terkadang dihadapkan pada berbagai hambatan, baik secara fungsional atau teknis hingga hambatan yang berasal dari masyarakat yang menolak kebijakan tersebut. Indonesia memiliki beberapa jenis kebijakan publik diantaranya kebijakan publik substantif, distributif, material dan barang publik. (Dunn,2000:9-10)

Kebijakan reklamasi sendiri adalah bagian dari kebijakan pemerintah dengan menjadikan masyarakat sebagai obyek kebijakan untuk kemudian dikelola dan diatur sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu diterbitkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menjelaskan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan reklamasi memberikan dampak dalam aspek sosial-politik karena menyangkut beberapa alasan pertama, kebijakan reklamasi berkaitan dengan pemindahan penduduk secara masif dalam jumlah besar, kedua, kebijakan reklamasi seringkali menjadi persoalan yang dilematis karena berhubungan dengan dampak terhadap lingkungan yang bukan saja berkaitan dengan lingkungan hidup, namun juga kehidupan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya terhadap

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

lingkungan dan ketiga, kebijakan reklamasi seringkali menyebabkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat yang kemudian menimbulkan perpecahan secara kolektif antara kubu masyarakat. Kebijakan reklamasi diperlukan karena alasan tertentu, diantaranya adanya kebutuhan lahan di wilayah tertentu, adanya grand design tata kota, pengembangan kompleks industrialisasi dan lain-lainnya. Kebijakan ini dijalankan melalui penimbunan (*reclaiming land*) pada wilayah yang telah direncanakan sebelumnya. (Porter and Benington, 2008:46)

Reklamasi merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan utama yaitu perluasan lahan daratan yang nantinya dapat difungsikan untuk kepentingan tertentu, diantaranya membangun zona industri, pemukiman, relokasi penduduk dan lain-lainnya. Kebijakan reklamasi mampu menjadi solusi perluasan lahan secara efisien dibanding harus mencari dan membebaskan fungsi lahan yang cenderung membutuhkan anggaran yang besar. (Porter and Benington, 2008:47-28)

Dalam pelaksanaan reklamasi terdapat pihak-pihak yang mendukung dan juga pihak yang menolak, baik dari kalangan masyarakat bawah (*grass roots*) dan juga dari elit politik. Masing-masing pihak yang mendukung ataupun yang menolak sama-sama memiliki alasan dan kepentingan tersendiri. Pihak yang menolak sebagian besar memiliki alasan bahwa reklamasi akan mengganggu kepentingan hidup bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir tersebut dan kemudian terdapat pihak penolak reklamasi lainnya yang menganggap kebijakan ini dapat merusak ekosistem pesisir, sedangkan pihak-pihak yang mendukung reklamasi beralasan bahwa kebijakan ini dapat menjadi model pembangunan yang efisien sebagai bagian dari tata kota moderen yang diadopsi oleh banyak negara dunia.

Dampak negatif atas kebijakan reklamasi yang dianggap merugikan juga dihadapi oleh perusahaan. Hal ini meliputi dampak sementara (*temporary effect*) yaitu lingkungan hingga arus lalu lintas yang terganggu dari dan menuju wilayah perusahaan yang terganggu akibat operasional proyek reklamasi. Kemudian terdapat juga dampak permanen (*permanent effect*) yaitu operasional perusahaan yang

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terganggu akibat zona bongkar, pencarian bahan baku di wilayah perairan yang terganggu dan dampak-dampak lainnya.

Kebijakan reklamasi merupakan penimbunan yang dijalankan secara terencana wilayah perairan, laut, sungai atau dana dengan harapan terbentuk lahan baru untuk kepentingan tertentu. Lahan hasil reklamasi disebut dengan lahan fill (*land of fill*). Metode reklamasi memiliki macam sesuai dengan peruntukannya, diantara pencampuran tanah subur dan sedimen dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian baru ataupun untuk merehabilitasi tanah yang kurang produktif atau dapat juga melalui penimbunan dengan menggunakan material padat untuk tujuan pemukiman ataupun infrastruktur. (Goudi, 1999:69-70)

Kebijakan reklamasi dijalankan oleh banyak negara-negara dunia untuk memperluas lahan dengan tujuan tertentu, diantaranya untuk mengembangkan lahan wilayah perkotaan yang semakin sempit, juga melokalisir kawasan industri agar tidak bercampur dengan wilayah bisnis atau pemukiman dan lain-lainnya. Adanya sejarah tentang perkembangan reklamasi ini, membuktikan jika ada proyek reklamasi yang berhasil dilaksanakan, diantaranya proyek reklamasi Pulau Sadiyat di Uni Emirat Arab, reklamasi Laut Kuning di China dan beberapa proyek lainnya. Namun tentu ada proyek yang tidak berhasil, diantaranya reklamasi pantai di Karachi Pakistan dan pengembangan kota internasional di Kolombo Srilanka yang masih menyisakan beberapa masalah yang harus diselesaikan. (Goudi, 1999:71)

Indonesia merupakan negara yang luas. Meskipun demikian Indonesia masih menghadapi persoalan pemerataan pembangunan yang sebagian besar terpusat di di Pulau Jawa dan Bali. Kondisi ini menyebabkan wilayah tersebut berkembang dengan semakin padat yang kemudian mendorong pertumbuhan kebijakan reklamasi dengan melihat keberhasilan dari proyek-proyek reklamasi dunia. Kebijakan reklamasi di Indonesia ternyata melahirkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maka kebijakan reklamasi dimaksudkan untuk mendukung keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sebagai persyaratan teknis dalam pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.(kkp.go.id) Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terdapat 37 proyek reklamasi di Indonesia, masing-masing 17 proyek yang sedang di reklamasi dan 20 proyek yang telah direncanakan.(suara.com)

Di Indonesia ada beberapa proyek dengan skala besar, seperti proyek reklamasi di Teluk Benoa di Bali yang dijalankan sejak tahun 2016 oleh PT. Tirta Wahana Bali Indonesia dengan biaya proyek sebesar Rp.31 Triliun. Proyek reklamasi Pantai Losari di Makassar yang telah dimulai sejak tahun 2000-an dan berhasil menimbun wilayah perairan seluas 1,466 hektar, serta proyek reklamasi Teluk Jakarta. Proyek reklamasi tersebut menimbulkan berbagai reaksi setuju dan tidak setuju di kalangan masyarakat. (Jurnal Aspirasi, 2020 :109)

Reklamasi Teluk Jakarta merupakan kebijakan pemerintah yang menimbulkan berbagai macam reaksi pro dan kontra. Tahun 1995 proyek ini dicanangkan yang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 meliputi reklamasi pantai utara Jakarta yang terdiri dari 14 pasal yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 13 Juli 1995, (jdih.jakarta.go.id) namun keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja badan koordinasi dan pengelolaan reklamasi pantai utara Jakarta yang terdiri dari 15 pasal yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan pada tanggal 4 Juni 2018 ini membatalkan adanya reklamasi di Teluk Jakarta. (peraturan.bpk.go.id)

Proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak lepas dari adanya politik, di mana terdapat banyak pihak yang mendukung, namun banyak juga pihak yang menolak, bahkan konflik ini telah berkembang pada tingkat kepala daerah dan kementerian yaitu ketika diterbitkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 dibatalkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2018. Persoalan konflik antar institusi lainnya adalah diterbitkannya surat keputusan (SK) Menteri Negara

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang amdal dan potensi kerusakan ekosistem Teluk Jakarta.(cnbcindonesia.com)

Partai politik yang mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta diantaranya Partai PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Gemong Warsono menyatakan sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta menyatakan bahwa proyek reklamasi harus terus berjalan karena telah memenuhi Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS), sedangkan beberapa kekurangan teknis dan regulasi akan dipenuhi kedepannya dan menjadi hal yang wajar sebagai kebijakan pembangunan. Partai pendukung lainnya yang juga mendukung diantaranya Partai Gerindra yang melalui Wakil Ketuaanya Mohammad Taufik menyatakan dukungannya atas proyek reklamasi Teluk Jakarta dan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.(metro-sindonews.com)

Konflik reklamasi Teluk Jakarta juga dapat dilihat dari aksi penolakan masyarakat, beberapa kasus diantaranya ada aksi demonstrasi Aliansi Korban Reklamasi (AKR) pada Oktober 2017 di Balai Kota Jakarta.(news.detik.com) Aksi-aksi serupa yang berlangsung pada 8 November 2018 yaitu aksi demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi nelayan dan mahasiswa yang berdemonstrasi secara intensif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Juni dan tempat-tempat lainnya. (viva.co.id)

Teluk Jakarta merupakan wilayah teluk yang terletak di perairan Laut Jawa di sebelah utara Provinsi DKI Jakarta. Wilayah ini menjadi sangat strategis karena menjadi muara 13 sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta. Teluk Jakarta memiliki luas wilayah sekitar 514 km. Wilayah perairan ini merupakan perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata sekitar 12 hingga 15 meter. Teluk Jakarta memiliki posisi strategis karena menghubungkan gugus kepulauan Seribu. Pendangkalan yang terjadi dari tahun ke tahun menjadi pertimbangan bahwa reklamasi Teluk Jakarta menjadi hal yang sangat mungkin untuk dilakukan secara teknis.(metro.tempo.co)

Kasus penolakan terhadap kebijakan reklamasi Teluk Jakarta terjadi karena beberapa pertimbangan, diantaranya berpotensi pada kerusakan lingkungan, hingga

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dampak sosial berupa hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir Jakarta. Pihak yang menolak kebijakan reklamasi, beberapa diantaranya organisasi masyarakat, seperti Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar), Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) dan elemen-elemen lainnya ataupun tokoh-tokoh politik, sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Alam, Rizal Ramli dan beberapa tokoh nasional lainnya.

PKS merupakan partai politik yang berdiri pada 20 Juli 1998 di Jakarta, sebelumnya PKS bernama Partai Keadilan. Partai ini berideologi Pancasila, Islamisme dan konservatisme sosial dengan menjadikan posisi politik sayap kanan dan kanan jauh. Makna ini menandakan bahwa PKS menjadi partai nasionalis liberalis, bukan sebagai partai kiri atau sosialis-komunis. Kasus program reklamasi di Teluk Jakarta, keberadaan PKS sebagai partai baru memiliki dampak yang kuat dalam konstelasi politik nasional dan konstelasi politik di daerah DKI Jakarta yang pada masa itu muncul kepemimpinan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, yang bertransformasi pada kepemimpinan Anis Baswedan sebagai dua Gubernur yang masing-masing memiliki basis masa pendukung yang umumnya saling berseberangan dan keberadaan PKS lebih mendukung pihak Anis Baswedan karena adanya persamaan visi politik, basis massa dan ideologi. Pemilu legislatif DKI Jakarta tahun 2019, PKS berhasil mengumpulkan sebanyak 16 kursi atau menduduki peringkat ketiga setelah PDI-Perjuangan dan Gerindra. Menunjukkan bahwa PKS mampu menjadi kekuatan potensial dalam kerangka bargain position terhadap pemerintah, termasuk pada kebijakan penolakan reklamasi di Teluk Jakarta.

Kebijakan reklamasi Teluk Jakarta yang ditolak oleh fraksi PKS dilatarbelakangi oleh persoalan administrasi, amdal dan dampak terhadap masyarakat pesisir yang tidak kunjung terselesaikan. Penolakan fraksi PKS diungkapkan oleh Presiden PKS, Mohammad S. Iman yang menyatakan bahwa *“...program reklamasi perlu ditinjau ulang karena masih belum sejalan dengan hukum positif di Indonesia.”* Pernyataan ini sekaligus sejalan dengan sikap partai PKS pada tahun-tahun sebelumnya yang bersikap tetap menolak kebijakan reklamasi tersebut yaitu pada tahun 2014 hingga 2016.

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Selain PKS menjadi partai yang menolak adanya reklamasi Teluk Jakarta, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan pernyataan lewat Abraham Lunggana jika menolak adanya reklamasi di tahun 2016. Menurut Lulung sendiri, reklamasi Teluk Jakarta harus ditinjau ulang karena banyaknya penolakan dari masyarakat pesisir. Tidak sedikitnya permintaan masyarakat pesisir untuk diberhentikan proyek reklamasi ini membuat Lulung selaku mantan Wakil DPRD DKI menolak adanya reklamasi Teluk Jakarta. (liputan6.com)

Adanya dukungan dan penolakan pada reklamasi Teluk Jakarta memberikan dampak tersendiri dalam permasalahan internal DPRD DKI karena terbelahnya dua kubu. Keadaan dalam DPRD DKI sendiri yang tak bisa memutuskan secara langsung perizinan proyek reklamasi harus melibatkan pihak eksekutif seperti Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menyetujui adanya perluasan daratan di atas laut. melalui surat keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 238 Tahun 2014. Pemprov sendiri menilai tidak ada dampak negatif dari reklamasi Teluk Jakarta. Pada tahun 2016, Ahok mantan Gubernur DKI Jakarta di masa jabatannya juga mendukung adanya reklamasi Teluk Jakarta karena menurutnya dampak positif adanya peluasan daratan di atas laut bukan hanya menguntungkan pihak Pemprov DKI yang mendapatkan tanah bersertifikat, melainkan pada masyarakat pesisir juga.

Lewat payung hukum Keputusan Presiden (Kepres) no. 52 tahun 1995, total tanah yang bersertifikat bisa dijual 55% dan dijadikan lahan usaha namun tanah tetap milik Pemprov DKI. Sisa lahan 45% yang menjadi milik Pemprov dapat dijadikan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk masyarakat.(Liputan6.com)

PKS sendiri menganggap bahwa program reklamasi Teluk Jakarta masih menghadapi persoalan hukum yang belum selesai, yaitu adanya persoalan tentang tumpang-tindihnya kewenangan antar instansi. Politis penolakan ini, bukan semata-mata sebagai sikap politik berkaitan dengan posisi PKS sebagai oposisi pemerintah, namun lebih dari itu kebijakan penolakan reklamasi ini bukan sekedar eforia politik, lebih memiliki pertimbangan dan latar belakang yang kuat kemudian teraktualisasi

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dalam sikap politik PKS dalam menolak kebijakan reklamasi Teluk Jakarta tersebut.
(republika.co.id)

Kajian ini dicantumkan juga beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, yang *pertama*, Reny Puspasari, *et,all* yang berjudul “Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan di Teluk Jakarta, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Vol.9 No.2 Tahun 2017 yang dalam kajiannya Reny Puspasari menyatakan bahwa kebijakan reklamasi memang merupakan proyek prestisius yang menjadi sorotan masyarakat dalam dan luar negeri, secara teknis dan matematis proyek ini memang dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah DKI, namun ditinjau dari lingkungan proyek reklamasi di Teluk Jakarta ini menyebabkan protensi degradasi terhadap lingkungan, diantaranya potensi penurunan keanekaragaman phitoplankton, penurunan produksi perikanan tangkap hingga penurunan keceraham perairan. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang ditulis oleh Reny Puspasary adalah sama-sama menjadikan reklamasi di Teluk Jakarta sebagai obyek penelitian, sedangkan perbedaanya penelitian Reny Puspasary lebih menekankan analisis mengenai dampak lingkungan, sedangkan penelitian ini lebih merujuk penolakan kelompok kepentingan terhadap kebijakan reklamasi tersebut.

Penelitian *kedua*, dikemukakan oleh Sharah Alisha yang berjudul “Konflik Antar Lembaga Pemerintah Dalam Menentukan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta”, Jurnal Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya 2019. Kajiannya Sharah Alisha menyatakan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1995 dan hingga tahun 2019 persoalan ini masih belum dapat terselesaikan secara mendasar, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa adanya konflik kepentingan, khususnya pada ranah pembahasan DPRD DKI Jakarta sehingga penerapan dapat dibatalkan dan kemudian dilanjutkan kembali dan terus-menerus menjadi polemik yang berujung pada konflik politik antar lembaga pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang ditulis oleh Sarah Alisha adalah sama-sama menjadikan reklamasi di Teluk Jakarta sebagai obyek penelitian, sedangkan perbedaanya penelitian Sharah Alisha lebih menekankan analisis mengenai konflik antar lembaga

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

atau institusi, sedangkan penelitian ini lebih penolakan kelompok kepentingan terhadap kebijakan reklamasi tersebut.

Penelitian *ketiga*, dikemukakan oleh Muhammad Sabri Mabang yang berjudul “Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Perluasan Wilayah di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara”, Jurnal Badan Pertanahan Republik Indonesia, Yogyakarta 2013. Di dalam kajiannya Sabri Mabang menyatakan bahwa reklamasi pantai merupakan bagian dari kebijakan pembangunan melalui penyediaan lahan/wilayah yang cukup efektif karena membutuhkan anggaran pembebasan yang relatif kecil dan meminimalisasi konflik sosial. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang ditulis oleh Muhammad Sabri Mabang adalah sama-sama menjadikan reklamasi dan kebijakan pemerintah sebagai obyek penelitian, perbedaannya penelitian Muhammad Sabri Mabang lebih menekankan analisis di wilayah Ternate, Provinsi Maluku Utara, berbeda dengan penelitian ini lebih mengarah ke kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

Penelitian *keempat*, dikemukakan oleh Rolan Kristian yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Berkenaan Dengan Pertambangan Minerba di Kota Samarinda Berdasarkan PP 78 Tahun 2010”, Jurnal Hukum Pro-Yustisia, Yogyakarta, 2016. Kajian Kristian menyatakan bahwa kebijakan reklamasi bukan hanya berkaitan pada pengembangan wilayah di wilayah pantai atau pulau saja, namun juga normalisasi lahan bekas tambang yang umumnya berada di luar Jawa, seperti Kota Samarinda, bahkan kebijakan reklamasi ini merupakan kewajiban yang diatur dalam undang-undang yang mengikat perusahaan-perusahaan pertambangan di wilayah tersebut. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang ditulis oleh Rolan Kristian adalah sama-sama menjadikan reklamasi yang diatur oleh regulasi/peraturan perundang-undangan sebagai obyek penelitian, sedangkan perbedaannya penelitian Rolan Kristian lebih menekankan di analisis kebijakan reklamasi lahan pasca tambang di Samarinda, sedangkan penelitian ini lebih menekan kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

Penelitian *kelima*, dikemukakan oleh Ronni Johan yang berjudul “Reklamasi Pantai Utara Jakarta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Lingkungan”,

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016. Kajiannya Ronni Johan menyatakan bahwa ditinjau dari hukum positif dan fiqh reklamasi Teluk Jakarta menjadi fenomena yang multi tafsir tergantung sudut pandang individu dan kelompok. Kebijakan reklamasi ini masih dihadapkan pada kebijakan yang tumpang tindih dan dapat memberikan dampak positif, sekaligus dampak negatif. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang ditulis oleh Ronni Johan adalah sama-sama menjadikan reklamasi di Teluk Jakarta, serta reaksi masyarakat dan kelas menengah sebagai obyek penelitian, sedangkan perbedaannya penelitian Ronni Johan lebih menekankan analisis kebijakan reklamasi dalam perspektif hukum positif dan fiqh, sedangkan penelitian ini lebih merujuk penolakan kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta oleh partai politik.

Penelitian *keenam*, dikemukakan oleh Armen Zulham Hikmah dan Zahri Nasution yang berjudul “Reklamasi di Teluk Jakarta dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Nelayan di Cilincing, Jakarta Utara”. Jurnal Riset Sosial Ekonomi dan Kelautan dan Perikanan, 2018. Kajiannya Hikmah dan Nasution menyatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta merupakan kebijakan yang telah melalui rangkaian pembahsan yang sistematis pada tingkatan pemerintah daerah dan DPR-D DKI, meskipun demikian kebijakan ini ternyata membawa pengaruh negatif diantaranya hilangnya atau terdesaknya kehidupan masyarakat di wilayah Cilincing akibat semakin sempitnya area wilayah penangkaran ikan di Jakarta Utara. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang ditulis oleh Armen Zulham Hikmah dan Zahri Nasution adalah sama-sama menjadikan reklamasi di Teluk Jakarta, serta reaksi masyarakat dan kelas menengah sebagai obyek penelitian, sedangkan perbedaannya penelitian Armen Zulham Hikmah dan Zahri Nasution lebih menekankan analisis dampak sosial bagi masyarakat di sekitar proyek reklamasi ini, sedangkan penelitian ini lebih menekan penolakan kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta oleh partai politik.

Penelitian *ketujuh*, dikemukakan oleh Siti Nurhayati Qodriyatun yang berjudul “Reklamasi Teluk Jakarta Perlukah dilanjutkan?”, Jurnal Kesejahteraan Sosial DPR-RI, Vol.IX, No.10, 2017. Kajiannya Qodriyatun menyatakan bahwa

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta menjadi persoalan yang terus dipertentangkan oleh stakeholder pembangunan di Indonesia dengan kelompok pecinta lingkungan hidup yang menilai bahwa program ini dapat merusak ekosistem pesisir. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang ditulis oleh Armen Zulham Hikmah dan Zahri Nasution adalah sama-sama menjadikan reklamasi di Teluk Jakarta, serta reaksi masyarakat dan kelas menengah sebagai obyek penelitian, sedangkan perbedaannya penelitian Siti Nurhayati Qodriyatun lebih menekankan analisis dampak reklamasi terhadap ekosistem sosial bagi masyarakat di sekitar proyek reklamasi ini, sedangkan penelitian ini lebih ke penolakan kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta oleh partai politik.

Penelitian *kedepalan* dikemukakan oleh Bayu Nanda Permana yang berjudul “Konflik Dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta Pada Masa Pemerintahan Basuki Tjahaja Poernama (Ahok) Periode 2015-2017”, Skripsi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018. Tulisannya Permana menyatakan bahwa kebijakan reklamasi di masa kepemimpinan Ahok dijalankan dengan menghadapi berbagai persoalan, diantaranya tumpang tindihnya peraturan dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga terungkapnya tindakan pidana korupsi oleh anggota DPRD-DKI. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang ditulis oleh Bayu Nanda Permana adalah sama-sama menjadikan reklamasi di Teluk Jakarta, serta berbagai persoalan yang muncul pada kebijakan ini sebagai obyek penelitian, sedangkan perbedaannya penelitian Bayu Nanda Permana lebih menekankan analisis persoalan yang muncul akibat kebijakan reklamasi, sedangkan penelitian ini lebih menjelaskan penolakan kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta oleh partai politik.

Penelitian *kesembilan*, ditulis oleh Imam Mahdi yang berjudul “Reklamasi Teluk Jakarta : Sebuah Perspektif Kekuasaan Dalam Ekonomi-Politik, Jurnal Transformasi Global Vol.4. Nomor 1.2017. Kajiannya Imam Mahdi menyatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta telah menjadi perhatian nasional sejak tahun 2015 dan keberadaannya menimbulkan persoalan yang dilematis karena di satu sisi kebijakan reklamasi ini dapat mendukung industri atau tempat hunian bagi para

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pekerja di Jakarta, namun pada sisi lain mendapatkan tentangan dari kelompok LSM karena dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan, merugikan nelayan, menyebabkan disparitas sosial dan lain-lainnya. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang ditulis oleh Imam Mahdi adalah sama-sama menjadikan reklamasi di Teluk Jakarta, serta berbagai persoalan yang muncul kebijakan ini sebagai obyek penelitian, sedangkan perbedaannya penelitian Imam Mahdi lebih menekankan analisis persoalan konflik sosial-politik yang muncul akibat kebijakan reklamasi, sedangkan penelitian ini lebih menjelaskan penolakan kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta oleh partai politik.

Penelitian *kese sepuluh*, dikemukakan oleh Rasminto and Syurya M. Nur yang berjudul “Studi Reklamasi Teluk Jakarta di Pulau C dan D Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Nilai-Nilai Pancasila”, Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan (Jurnal JGEL), Vol.2. Nomor 2. Juli 2018. Kajiannya M Rasminto and Syurya M. Nur menyatakan bahwa reklamasi Teluk Jakarta, khususnya Pulau C dan D merupakan program pembangunan berkelanjutan yang dijalankan bersamaan dengan laju pembangunan penduduk DKI Jakarta yang semakin pesat dan jika disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila maka kebijakan ini harus memenuhi beberapa hal mendukung dan menjaga iklim kehidupan sosial secara sehat, lingkungan, ekonomi baik kelas menengah, penguasaha ataupun masyarakat lapisan bawah dan sosial-budaya. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang ditulis oleh Rasminto and Syurya M. Nur adalah sama-sama menjadikan reklamasi di Teluk Jakarta, serta berbagai persoalan yang muncul pada kebijakan ini sebagai obyek penelitian, sedangkan perbedaannya penelitian Imam Mahdi lebih menekankan analisis kebijakan reklamasi dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan penelitian ini lebih ke penolakan kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta oleh partai politik.

Sepuluh penelitian di atas menunjukkan fakta penolakan proyek prestisius ini tidak semata-mata menjadi bagian dari eforia politik berkaitan dengan demokrasi, terkait dengan posisi PKS sebagai partai oposisi, namun konflik juga terjadi di antara lembaga pemerintah sendiri, bahkan dampak buruk terhadap lingkungan akibat

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

proyek reklamasi ini juga dilegitimasi oleh institusi pemerintah dalam hal ini adalah KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sehingga penolakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta menjadi hal yang rasional yang menarik untuk diteliti lebih lanjut sebagai bagian dari studi ilmu politik.

Reklamasi di Teluk Jakarta menjadi fenomena sosial-politik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak lepas dari sikap pro dan kontra dari masyarakat hingga perusahaan yang menolak kebijakan tersebut. Beberapa perusahaan ini diantaranya perusahaan perkapalan, diantaranya PT.Pelayaran Nusantara ataupun PT Equinox Bahari Nusantara yang terganggu karena sebelum proyek reklamasi, Teluk Jakarta dilewati sekitar 600 hingga 600 kapak berbagai ukuran.(properti.kompas.com)

Kerugian tentang reklamasi bagi perusahaan-perusahaan dan kehidupan masyarakat juga dapat dilihat dari rusaknya situs bersejarah, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa yang terus tergerus proyek ini. Selain itu, reklamasi Teluk Jakarta ini juga mengganggu operasional PLTU Muara Karang yang lokasinya berdekatan dengan Teluk Jakarta dan matinya ekosistem ikan di pesisir perairan tersebut. Berbagai kasus penolakan inilah yang membuktikan bahwa kebijakan reklamasi masih menimbulkan sikap pro dan kontra bagi masyarakat Jakarta dan Indonesia. Fakta ini kemudian menjadi isu-isu penting yang disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menolak kebijakan reklamasi tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah, yaitu :

“Bagaimana dampak penolakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta?”

1.3. Tujuan Penelitian

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1.3.1. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penolakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

1.3.2. Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dampak penolakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta dikaitkan dengan diskursus dari studi ilmu politik, khususnya kritik terhadap kebijakan publik dan kebijakan pembangunan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah meliputi dua hal, masing-masing sebagai berikut :

a. Secara akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi, evaluasi dan kritik terhadap kebijakan publik, khususnya berkaitan dengan dampak penolakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah sikap kritis tentang kebijakan publik di Indonesia, khususnya pada kasus dampak penolakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi atas lima bab yang masing-masing berkaitan antara satu dengan yang lain dengan perincian berikut :

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian meliputi tujuan praktis dan teoritis, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi konsep dan teori yang digunakan yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

Bab III merupakan bab metode penelitian yang berisi obyek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, serta tabel rencana waktu.

Bab IV merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang dampak penolakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian pembahasan dari bab-bab sebelumnya, serta saran kepada pemangku kepentingan serta akademisi ilmu politik bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro, 2023

**ANALISIS DAMPAK PENOLAKAN KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA OLEH FRAKSI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]